

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adrian Sutedi. (2015). *hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. jakarta: sinar grafika.

Arnold Ferdinand. (2023). *pemerintahan daerah konsep teori dan karakteristik*. purbalingga: CV.Eureka.

Ali Achmad. (2009). *menguak teori hukum (legal Theory) &Teori peradilan (JudicialPrudence*. jakarta: kencana.

Ardiansyah. (2023). *hukum perizinan*. yogyakarta: deepublish.

Awan Y. Abdoellah, dan Yudi Rusfiana. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik*. Bandung : Alfabeta.

Daud Mohammad. (2012). *hukum islam*. jakarta : PT.RajaGrafindo.

Dellyna Shant. (1998). *konsep penegakan hukum*. bandung: PT.Citra daya bakti.

Irwansyah. (2020). *kajian ilmu hukum*. yogyakarta: mirra buana.

Irwansyah. (2021). *penelitian hukum pilihan metode& praktik penulisan artikel*. yogyakarta: Mirra Media.

Joko Pramono. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Ranjarsari : Unisri Press.



Siti. (2022). *hukum perizinan berusaha berbasis resiko*. yogyakarta: pustaka ilmu.

Muslichah Erna Widiani. (2020). *pengantar manajemen* . purwokerto selatan :

CV.Pena persada redaksi.

Nur Solikin. (2019). *Hukum, Masyarakat dan penegakan hukum*. Pasuruan :

CV.Penerbit Qiara Media.

Piatur Pangaribuan, dan AriePurnomosidi. (2012). *Negara Hukum dalam kerangka NKRI*. Surakarta : Cakrawala Media.

PhilipusM. (1993). *Pengantar hukum perizinan*. surabaya: yuridika.

Satipjo Rahardjo. (1996). *ilmu hukum*. bandung: PT.citra aditya bakti.

SitiKotijah. (2020). *Hukum perizinan*. surabaya: CV.MFA.

Sigit Sapto Nugroho. (2021). *Hukum perzinan berbasis OSS (online single submission)*. klaten: lakeisha.

Taufiq rakhman. (2014). *Kebijakan publik pendelegasian tanggungjawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan*. Jakarta  
Pusat : fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Moestopo  
Beragama.

Yusri Munaf. (2016). *Hukum Adminitrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan tujuh.

## SKRIPSI

Rizkv Yulia Ilmi . (2021). *Implementasi peraturan pengelolaan rumah kos di kota makassar*. Makassar: universitas hasanuddin.



## JURNAL

abdullah. (2017). konsep umum pelaksanaan kebijakan public. *jurnal publik*, 4.

fuji. (2021). pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha online single submission (OSS) di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPSTSP) kota samarinda. *jurnal administrasi publik*, 5019.

isya. (2021). penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum dibidang lingkungan hidup. *law jurnal*, 49.

nunung. (2019). peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintah yang baik (Good Governance) di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. *jurnal media birokrasi*, 1.

rusdin. (2022). efektifitas pelayanan pembelian izin mendirikan bangunan di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu kota makassar . *jurnal inovasi dan pelayanan publik makassar*, 20

sanyoto. (2008). penegakan hukum di indonesia. *jurnal dinamika hukum*, 115.

suko. (2017). mekanisme pembatalan peraturan daerah dan akibat hukumnya berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori . *jurnal surya kencana satu* , 5.

Wida. (2022). pelaksanaan perizinan berusaha melalui online single submissin (OSS) oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu DPMPSTSP) kabupaten sukarharjo. *jurnal bagian hukum admnistrasi negara*, 122.



wijaya. (2015). kewenangan pemerintah daerah penerbitan suat izin usaha perdagangan di kota palu. *jurnal hukum legal opinion*, 3.

## PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost

Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaa Rumah Kost

## INTERNET

Christino. (2023, juli 16). *Perda Pengelolaan Rumah Kos Belum Berjalan Iaksimal*. <https://www.rri.co.id/daerah/288811/perda-pengelolaan-mah-kos-belum-berjalan-maksimal>



- Faisal, M. (2019, juli 18). *10 Penghuni Kos Eksklusif dikota Makassar terjaring Razia dikota Makassar*. Diambil kembali dari ,  
<https://daerah.sindonews.com/artikel/makassar/28694/10-penghuni-kos-eksklusif-di-makassar-terjaring-razia-narkoba>
- Irwan. (2013). *Metedologi Penelitian*. Diambil kembali dari.  
<http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>,
- Reza, R. (2022, Desember 3). *Ogak dibawah ke kantor, Mahasiswa terjaring Razia Indekos dimakassar Sebut Nama Pejabat Polisi*. Diambil kembali dari  
<https://portalmedia.id/read/4638/ogah-dibawa-ke-kantor-mahasiswa-terjaring-razia-indekos-di-makassar-sebut-nama-pejabat-polisi>
- Statistik, B. P. (2021-2023). Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan.



**LAMPIRAN 1 : FOTO-FOTO WAWANCARA BERSAMA PEMILIK RUMAH  
KOS**





Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



**LAMPIRAN 2 : FOTO WAWANCARA BERSAMA STAF KEPALA BAGIAN  
IMB DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

